

**"EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
KELUARGA MISKIN (PEKM) DI KECAMATAN BAMBANGLIPURO  
DAN KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL"**

Oleh: RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni

**Abstract**

*Policies, programs, and activities for coping and lessening poverty is an agenda of regional development conducted by Bantul Regency Government to minimize its people which is still below the standard of poverty limit and to improve them to the higher level of prosperity. In implementation of this policies through Poor Family Economic Empowering Program (PEKM), as the daily manager are BKK, PP and KB of Bantul Regency together with related offices/ institutions (stakeholders) which are competent in it own field under a coordination of Regional Poverty Coping Team (TKPK-D). The purposes of PEKM programs are encouraging poor family to get productive economic business to increase economic family income, and also decreasing poverty number in Bantul Regency area. Whereas, the objectives of this programs are poor society specifically focused on women community with the reason that in this programs is also implemented family planning program (KB). Moreover, this research results as follow: (1) Output of programs including; the amount of grant, loan fund allocation of concerned groups; the number of PLKB and job load of PLKB in supervision; frequency level of activities/ meeting/ instalment return of PEKM group; frequency level of trainings and business supervision to PEKM group; frequency level of dissemination and supervision of family planning program; and frequency level of advises in using contraception devices, and also briefing of technical guidance book to PEKM programs implementation. (2) Outcome of programs including; ability to increase knowledge and skills of PEKM group members; ability to increase the asset of productive economic business for PEKM group members; ability to develop productive economic business in the field; realization of quality and product types improvement sold by PEKM group*

*members; realization of knowledge, awareness and motivation improvement of society in family planning program; and realization of participation increase of the number of KB acceptor members. Whereas, (3) Impact of programs including; family income increase from productive economic business; as well as society participation increase in family planning program and birth rate decrease and also birth spacing management.*

*Key words: Society empowering; Poor Family Economic Empowering Program (PEKM); Family planning (KB) program; Monitoring and evaluation (monov); Programs efectivity level; Before and after program implementation; Output, outcome, and impact of programs; Stakeholders; and Society participation.*

## **Pendahuluan**

Indonesia pada saat ini terdapat sekitar 40 juta jiwa penduduk miskin dari kurang lebih 238 juta jiwa penduduk keseluruhan. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang memprihatinkan dan menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Terkait dengan fenomena kemiskinan yang terjadi seperti halnya masalah kependudukan dan masalah kesejahteraan. Fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini dipengaruhi oleh multifaktor dan multidimensi. Fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia salahsatunya dipengaruhi oleh masalah kependudukan yang berimplikasi pada masalah kesejahteraan. Menyangkut masalah kependudukan dapat mengakibatkan terjadinya "baby booming" yaitu ledakan jumlah kelahiran yang tidak terkendali dan belum teratasi. Sedangkan masalah kesejahteraan menyangkut rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang berakibat pada timbulnya masyarakat miskin baru.

Pada masa Orde Baru, kebijakan mengenai Program Keluarga Berencana dapat mengatasi masalah "baby booming" (ledakan jumlah kelahiran bayi). Namun pada saat ini (Orde Reformasi) kekhawatiran terhadap masalah ini akan muncul kembali apabila pemerintah tidak concern terhadap Program KB (berkurangnya intervensi pemerintah terhadap Program KB). Hal ini dapat dilihat melalui keikutsertaan atau

partisipasi masyarakat dalam Program KB (menjadi akseptor KB) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu kurang lebih 61% dari jumlah keseluruhan PUS. Akan tetapi sekitar 39% dari jumlah keseluruhan PUS yang tidak mengikuti Program KB adalah sebagian besar masyarakat yang tergolong miskin. Di samping itu jumlah tanggungan anak yang dimiliki oleh masyarakat miskin tergolong banyak, apalagi keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam Program KB masih tergolong rendah.

Upaya menuju keluarga sejahtera adalah tanggungjawab bersama; pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan keagamaan, serta organisasi PKK, perlu terus menerus melakukan pembinaan, baik pembinaan mental, spiritual, ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada keluarga pra sejahtera serta Keluarga Sejahtera I di seluruh tanah air. Jika semua pihak bersatu, peduli dan memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, maka upaya menuju keluarga yang berkualitas dan sejahtera akan terwujud. BKKBN diharapkan dapat meningkatkan program sasaran prioritas bagi pengembangan pelaksanaan Program KB Nasional. Jangan berpuas diri dengan keberhasilan Program KB saat ini. Jangan berhenti memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya membatasi jumlah anak dalam keluarga. Buatlah sasaran program prioritas pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang berkaitan dengan daya dukung ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas keluarga Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono dalam Jurnal BKKBN, 2006: 2 – 3).

Tabel 1: Data Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010

No	Kecamatan	Jumlah sasaran peserta KB	Jumlah akseptor KB
1.	Kretek	631	412
2.	Sanden	571	457
3.	Srandakan	530	506
4.	Pandak	1.246	974
5.	Bambanglipuro	865	443
6.	Pundong	896	502
7.	Imogiri	1.700	727
8.	Dlingo	1.051	599
9.	Jetis	1.436	655
10.	Bantul	1.304	827
11.	Pajangan	758	342
12.	Sedayu	895	718
13.	Kasihan	2.004	1.409
14.	Sewon	2.596	1.423
15.	Piyungan	1.880	701
16.	Pleret	1.148	562
17.	Banguntapan	3.249	1.813

(Sumber: Data Jumlah Peserta KB Tahun 2009-2010 dari BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul).

Default Paragraph Font; Dari data di atas terlihat bahwa terdapat beberapa Kecamatan di Kabupaten Bantul yang memiliki jumlah akseptor KB yang tergolong relatif rendah. Berdasarkan data dari jumlah sasaran Keluarga Berencana dengan jumlah akseptor KB masih terpaut sangat banyak diperkirakan jumlah akseptor KB hanya separuhnya (50%) dari jumlah sasaran KB (jumlah wanita yang tergolong dalam PUS). Terlebih pada Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Bambanglipuro, jumlah akseptor KB masih relatif rendah (hanya 50% nya dari jumlah sasaran KB). Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program KB dan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Bambanglipuro masih banyak yang tergolong keluarga Pra Sejahtera.

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) ini mencakup program penanggulangan kemiskinan dan Program Keluarga Berencana. Program PEKM merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan sasaran pada keluarga khususnya Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I. Strategi pemerintah untuk program ini adalah mengurangi beban orang miskin dan sekaligus membuka kesempatan berusaha. Membuka peluang usaha melalui usaha mikro keluarga sebagai cara efektif dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) ini dilakukan di dua Kecamatan yaitu; Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pajangan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul. Program PEKM dikatakan berhasil apabila diikuti dengan keberhasilan masyarakat dalam mengembangkan usahanya dalam bidang ekonomi, juga adanya kepedulian warga masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya, selain itu juga diikuti adanya penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Program PEKM dikatakan berhasil apabila diikuti pula dengan adanya perubahan sikap masyarakat, dan adanya partisipasi masyarakat (keikutsertaan masyarakat) dalam Program Keluarga Berencana, juga diikuti adanya pengaturan dan penurunan jumlah kelahiran.

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui BKK, PP dan KB sebagai pelaksana program. Program PEKM ini didalamnya menempel Program KB. Program PEKM ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin supaya mereka dapat mengangkat dirinya sendiri melalui rangsangan kesadaran minat, semangat, dan keterampilan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk mendorong keluarga miskin agar mereka memiliki usaha ekonomi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga dan diharapkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin (PEKM) dalam jangka panjang mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul. Program PEKM ini bertujuan untuk mengatasi masalah kesejahteraan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin (PEKM) ini mempunyai sasaran untuk mengubah *mindset* masyarakat khususnya masyarakat miskin, dari perilaku atau kebiasaan konsumtif menjadi produktif sehingga kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik. Sedangkan Program KB yang menempel pada Program PEKM ini bertujuan untuk mengurangi dan membatasi jumlah kelahiran sebagai

langkah untuk mengatasi masalah kependudukan. Dalam jangka panjang, untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi, maka masalah kependudukan dan masalah kesejahteraan ini terlebih dahulu harus diatasi.

Dari paparan permasalahan di atas maka rumusan permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa tinggi efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM)?
2. Seberapa jauh pencapaian tersebut dapat memberikan akibat pada partisipasi masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana (KB)?
3. Seberapa jauh Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas di muka, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa tinggi efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM).
2. Mengetahui seberapa jauh pencapaian tujuan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) tersebut dapat memberikan akibat pada partisipasi (keikutsertaan) masyarakat miskin dalam Program Keluarga Berencana.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **Landasan Teori**

### **Evaluasi Efektivitas Program**

Menurut Dunn, evaluasi kinerja kebijakan. Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan: "Apa perbedaan yang dibuat?". Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara restrospektif, sementara kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif. Kriteria evaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan,

yang dijabarkan pada Tabel 2; sebagai berikut:

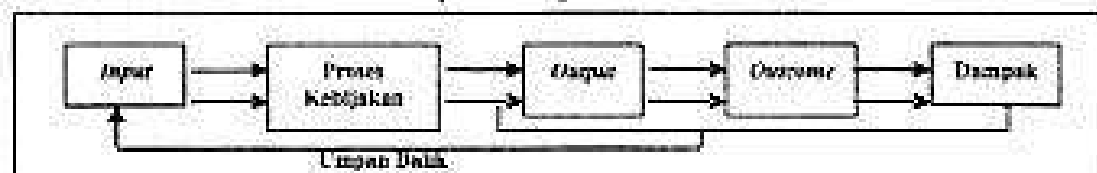
Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Berapa banyak dipergunakan sumber daya?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?
Pemerataan (equity)	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber diambil dari: Riant Nugroho D., 2007: 27

Kemudian juga, evaluasi kebijakan mempunyai beberapa *point* tujuan yang dapat diperincikan, antara lain: a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan; b) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan; c) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan; d) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahapan lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif; dan e) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang (Subarsono, 2006: 120-121).

Tujuan akhir dari evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan masukan dari proses kebijakan ke masa depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik, dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 1: Kebijakan sebagai Suatu Proses



Sumber: diambil dari Subarsono, 2006: 121

Apa yang dimaksudkan dengan *input* adalah bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. *Input* tersebut berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat. *Output* adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program. Sedangkan, *outcome* adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Adapun, *impact* (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan (Subarsono, 2006: 121-122).

Sedangkan, efektivitas adalah suatu tindakan dimana tindakan itu akan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja. Efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Identifikasi efektivitas dalam pengembangan usaha kecil melalui jangkauan sasaran, penggunaan dana kredit, pelayanan kredit dan tingkat bunga kredit. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar. Sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar. Efisien namun tidak efektif berarti baik dalam pemanfaatan sumberdaya (*input*) namun tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran digunakan sumber daya yang berlebihan.

Evaluasi Efektivitas Program PEKM adalah mengawasi dan menilai (*monitoring* dan *evaluasi money*) realisasi yang dapat dicapai selama program tersebut berlangsung dibanding dengan tingkat pencapaian atau potensi dari Program PEKM dalam mencapai tujuannya. Pada penelitian ini, untuk mengukur efektivitas dari program PEKM adalah dengan jalan melihat sejauhmana keberhasilan Program PEKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan dana bergulir untuk pengembangan usaha ekonomis produktif rumah tangga. Apabila Program PEKM berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan dana bergulir maka dapat dikatakan bahwa Program PEKM bisa berjalan efektif dalam

penanggulangan kemiskinan dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan *mindset* kehidupan konsumtif menjadi produktif melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.

### **Kerangka Berpikir**

Berdasarkan Teori dan Kajian Pustaka seperti yang telah dikemukakan maka dapat dideskripsikan bahwa penelitian ini berusaha untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat miskin sebelum (*before*) mendapatkan bantuan dana bergulir dari Program PEKM, dan sesudah (*after*) mendapatkan bantuan pinjaman modal bergulir melalui Program PEKM dari BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul. Pada konteks ini, penelitiannya memfokuskan pada evaluasi efektivitas Program PEKM untuk memonitoring dan mengevaluasi (*monov*) program tersebut ketika diimplementasikan di lapangan. Apakah Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin ini sesudah dilaksanakan pada tataran praktisnya mampukah berjalan secara efektif di lapangan? Dalam hal ini proses penganalisisannya untuk mengetahui tentang *output*, *outcome*, dan *impact* dari implementasi Program PEKM pada masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pinjaman dana bergulir, yakni sekaligus melalui partisipasi mereka dalam mengikuti Program Keluarga Berencana (KB).

Selanjutnya di dalam penelitian ini melalui langkah-langkah kinerja analisis penelitian-penelitiannya dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monov*) terhadap program tersebut untuk mengetahui sejauhmana efektivitas Program PEKM ketika diimplementasikan mampukah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dan berjalannya program tersebut dapat tercapai secara optimal (*output*). Kemudian bisakah menunjukkan efektivitas yang betul-betul menciptakan capaian yang baik dan tepat (efektif) pada sasaran program tersebut, serta dapat mengakibatkan kepada masyarakat miskin mengalami perubahan-perubahan yang mencerminkan nilai-nilai yang lebih positif dari sebelumnya (*outcome*). Adapun juga dapat ditarik analisis lebih jauh lagi, di dalam penelitian ini dengan dilakukan evaluasi efektivitas Program

PEKM terhadap dampak-dampaknya lebih jauh lagi kepada masyarakat yang terkena program dan terhadap keberlanjutannya kepada kondisi-kondisi masyarakat mengenai dampak-dampak (*impact*) dari implementasi program tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Penulis melakukan analisis kebijakan mengenai program yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang diemban oleh BKK, PP dan KB sebagai pelaksana hariannya, yaitu; implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) yang diimplementasikan bersamaan dengan Program Keluarga Berencana (KB). Pada konteks ini, penulsiannya menitik-tekankan: "Evaluasi Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) di Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul".

Lokasi penelitian di dalam penyusunan karya riset ilmiah-akademis ini keberadaannya di Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pajangan. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa tahapan yang dipakai, yakni; observasi, *interview* (wawancara) dan kuesioner menggunakan metode *life history*, dan kemudian melakukan pendokumentasian dari berbagai data-data yang didapatkan di lapangan maupun data-data yang berasal dari BKK, PP dan KB sendiri. Selanjutnya, metode pengolahan data yang dipergunakan oleh penulis menggunakan beberapa pendekatan yang sudah lazim dipakai secara umum, yakni; pengolahan data mencakup kegiatan mengedit (*editing*) dan mengkode (*coding*) data. Setelah pengolahan data, tahap berikutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan data.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian yang menyangkut variabel efektivitas, meliputi antara lain: 1) Hasil kuesioner yaitu daftar pertanyaan mengenai masalah yang sedang diteliti kepada responden; 2) Hasil wawancara langsung dengan responden tentang masalah yang sedang diteliti; dan 3) Pengamatan langsung atau observasi mengenai masalah yang sedang diteliti. Data

sebagai berikut:

**1. Pengalokasian dan Ketepatan Penggunaan Dana Oleh Anggota Kelompok PEKM.**

Pengalokasian pinjaman dana bantuan bergulir yang telah diberikan kepada masing-masing anggota kelompok PEKM yang ada di Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pajangan, sejauh ini dipergunakan untuk penambahan modal usaha yang telah mereka lakukan, atau membuka usaha baru bagi mereka para keluarga miskin maupun sebagian keluarga sejahtera yang menginginkan peningkatan pendapatan keluarga mereka. Dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki melalui keberanian dan semangat yang dipunyainya, mereka mulai membuka usaha baru dan menambah modal baru bagi yang sudah memiliki usaha melalui pinjaman dana bantuan yang telah mereka terima. Mereka melakukan usaha baru maupun mengembangkan usaha yang telah dijalankan selama ini, dan dengan harapan suatu saat kelak mengalami kemajuan dan peningkatan pendapatan atau keuntungan yang begitu berarti untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Di mana pada saat ini, berbagai kebutuhan pokok maupun biaya pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit (mengalami kenaikan), atau era sekarang disebut dengan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan kehidupan mereka terhimpit oleh berbagai problema keuangan (finansial).

Berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang telah dijalankan maupun usaha-usaha baru yang mereka mulai rintis khususnya yang dijumpai di Kecamatan Pajangan dan di Kecamatan Bambanglipuro, antara lain meliputi: usaha kerajinan batik kayu, usaha kerajinan bathok (terbuat dari tempurung kelapa), usaha kerajinan anyaman, usaha membuat amping mlinjo aneka rasa, usaha membuat keripik pisang aneka rasa, usaha ternak (ternak sapi, kambing, ayam, itik, bebek), usaha perikanan lele, usaha membuka angkringan, toko kelontong, usaha jahitan, usaha membuka warung makan, membuat snack (partai besar dan kecil), usaha membuat kue basah dan kue kering, usaha catering, usaha sayur keliling, usaha membuat keripik kentucky, usaha menjual gorengan, usaha membuat tahu dan ayam kentucky serta ada yang

bermatapencaharian sebagai petani dan buruh bangunan,

## **2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan yang Didapat Oleh Anggota Kelompok PEKM.**

Tindakan-tindakan pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Tim PLKB dan BKK, PP dan KB berkerjasama dengan instansi dinas terkait yang berkompeten di bidangnya mengenai berbagai materi dan keterampilan yang telah mampu diberikan bagi para anggota kelompok sasaran Program PEKM. Hal ini mempunyai tujuan-tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka terhadap manajemen organisasi, manajemen kewirausahaan, kemampuan memproduksi produk-produk yang berkualitas, keterampilan menjahit, keterampilan perbengkelan, dan kemampuan keterampilan pengemasan produk supaya memiliki daya saing yang kompetitif, serta pelatihan SP-IRT (Sertifikasi Penyuluhan Industri Rumah Tangga) dan sebagainya. Adapun, bagi para anggota kelompok sasaran PEKM terhadap pelatihan dan pembinaan selama ini yang telah mampu dilakukan tersebut mempunyai *efek-efek (akibat-akibat) yang cukup besar, dan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dapat dirasakan serta sangat berguna sekali bagi perkembangan usaha ekonomi produktif yang telah dijalankan oleh mereka, sebagai kelompok sasaran.*

## **3. Peningkatan Modal, Peningkatan Kualitas Produk, dan Kemampuan Perkembangan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Anggota Kelompok PEKM.**

Efek-efek (akibat-akibat) yang dapat dirasakan dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga bagi para anggota kelompok sasaran Program PEKM, mengenai pengucuran pinjaman dana bantuan bergulir yang dilakukan oleh Pemda Bantul melalui pelaksana tugas harian yang diemban oleh BKK, PP dan KB sebagai kebijakan, program, maupun kegiatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, yaitu antara lain:

### **a. Peningkatan Modal bagi Anggota Kelompok PEKM.**

Mengenai pinjaman modal Program PEKM sebesar

Rp. 1.000.000,00 kepada masing-masing anggota kelompok yang ada di tiap-tiap Kecamatan. Hal ini sangat berguna sekali untuk meningkatkan usaha-usaha skala mikro yang telah dikembangkan oleh masing-masing anggota ataupun untuk mulai membuka usaha-usaha baru yang sedang dirintisnya. Perolehan pinjaman modal ini mereka gunakan untuk tambahan modal usaha yang telah dibuka atau dikembangkan sehingga terjadi peningkatan modal untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok PEKM. Mereka yang tergabung di dalam anggota kelompok PEKM merupakan keluarga-keluarga miskin atau ada sebagian keluarga sejahtera. Dengan bantuan pinjaman modal yang telah didapatkannya, mereka memiliki harapan dan keinginan yang sangat besar sekali, untuk dapat meningkatkan hajat hidupnya dari ketidakberdayaan secara sosial-ekonomi menjadi berdaya untuk mengembangkan kemampuan dirinya menjadi pribadi-pribadi yang mandiri secara sosial-ekonomi.

Maka dengan ini mereka mulai merintis berbagai usaha yang telah dijalankannya untuk dapat ditingkatkan volume produksinya maupun bisa mengembangkan peluang-peluang baru bagi usaha skala mikro yang mereka telah jalankan selama ini. Sedangkan, bagi para keluarga miskin maupun sebagian keluarga sejahtera akan dapat membuka usaha-usaha baru yang berorientasi pada peningkatan pendapatan keluarga mereka, maupun dapat memberikan kesibukan baru bagi anggota keluarganya, serta untuk dapat menciptakan peluang-peluang usaha baru yang mulai mereka jalankan saat ini.

#### **b. Peningkatan Kualitas Produk bagi Anggota Kelompok PEKM.**

Melalui berbagai materi pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi/ dinas yang terkait di bidangnya tersebut, cukup dapat membenarkan peningkatan kemampuan *skill* bagi anggota-anggota kelompok PEKM. Walaupun, metode pelatihan yang diberikan hanya masing-masing Kecamatan yang ada melalui PLKB merekomendasikan terhadap 3 orang utusan dari anggota kelompok PEKM di wilayah satuan kerjanya. Namun demikian, setelah mendapatkan bekal berbagai pelatihan dan keterampilan yang didapatkan oleh 3 orang utusan tersebut, mereka mempunyai kewajiban untuk menularkan/ membagi berbagai

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang telah didapatkannya.

Sistem pemberian pelatihan ini melalui sistem perwakilan sehingga terdapat beberapa anggota PEKM yang tidak pernah atau belum pernah mengikuti pelatihan. Hal ini dikarenakan yang mendapatkan pelatihan usaha hanya perwakilan dari setiap kecamatan maupun perwakilan setiap kelompok PEKM (yang biasanya diwakilkan oleh kader maupun pengurus PEKM) yang kemudian nantinya dari perwakilan yang diikutsertakan mengikuti pelatihan tersebut menyampaikan materi pelatihan yang telah diperoleh tersebut kepada anggota PEKM lainnya pada saat diadakan pertemuan rutin maupun pertemuan kader yang didampingi oleh PLKB. Pelatihan yang diikuti melalui perwakilan seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan biasanya pelatihan tersebut diadakan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi. Sedangkan pelatihan yang diadakan di Kecamatan maupun pelatihan yang disampaikan oleh PLKB dapat melibatkan seluruh anggota PEKM melalui kunjungan PLKB pada masing-masing kelompok PEKM maupun pada saat pertemuan kader yang diadakan di Balai Desa.

### **c. Kemampuan Perkembangan Usaha bagi Anggota Kelompok PEKM.**

Melalui bantuan pinjaman modal dari Program PEKM ini kemanfaatan yang dapat dirasakan dan diperoleh bagi para anggota kelompok tersebut sangat besar sekali. Kemanfaatan ini adalah menjadikan para anggota kelompok yang sudah memiliki usaha yang telah dijalanannya dapat menambahkan modal baru dan pinjaman yang telah didapatkan, meningkatkan kualitas produk dari berbagai pelatihan yang telah didapatkannya, mampu meningkatkan variasi produk yang dipasarkannya maupun volume produk yang dijualnya, dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya melalui keuntungan yang lebih besar lagi (lebih banyak lagi). Sedangkan, bagi para anggota kelompok PEKM yang baru saja membuka usaha-usaha baru dengan skala mikro yang dilakukannya, akan dapat memberikan optimisme untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarganya.

Bagi usaha mikro dan bagi usaha kecil yang baru dijalankan (untuk

modal membuka usaha baru), pinjaman modal PEKM ini sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat sekali. Dan dengan adanya perolehan *reward* akan memotivasi para anggota PEKM dalam mengembangkan usahanya dan mendorong untuk dapat mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu supaya mendapatkan *reward*. Sebagian besar anggota PEKM di Kecamatan Pajangan maupun di Kecamatan Bambanglipuro mendapatkan bantuan pinjaman PEKM tersebut selama dua periode sehingga hal ini akan sangat membantu sekali dalam penambahan modal usaha bagi usaha yang sedang dijalankan maupun usaha yang baru saja dibuka.

#### **4. Peningkatan Pengetahuan, Motivasi, dan Kesadaran Bagi Anggota Kelompok PEKM Terhadap Program KB dan Peningkatan Jumlah Akseptor KB.**

Terhadap efek (akibat) yang dapat dirasakan dan pengaruhnya oleh para anggota kelompok sasaran Program PEKM dengan adanya pengucuran pinjaman bantuan dana bergulir, dan borsamaan di dalamnya dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan Program KB. Sejauh ini dari implementasi program-program tersebut dapat memberikan pengetahuan, motivasi-motivasi, dan membangkitkan kesadaran bagi mereka-mereka mengenai fungsi ketahanan keluarga secara sosial-ekonomi maupun kemanfaatan yang dapat diambil dari mengikuti Program KB. Dengan adanya pengucuran pinjaman bantuan dana bergulir Program PEKM yang diberikan kepada para keluarga miskin maupun sebagian keluarga sejahtera, maka hal ini mempunyai akibat-akibat pada peningkatan ekonomi keluarga miskin atau sebagian keluarga sejahtera menuju kesejahteraan bagi kehidupan mereka, dan mereka sangat antusias sekali dan merespons positif sekali terhadap Program KB dan menjadikan paham atas kemanfaatannya sebagai anggota akseptor KB.

Proses pendampingan dalam hal ini sosialisasi dan pembinaan-pembinaan Program KB yang diadakan ini sangat efektif dalam memberikan motivasi, dan memberikan perubahan pola pikir bagi anggota yang belum akseptor untuk bergabung menjadi akseptor, tanpa pemaksaan dan atas dasar kesadaran pribadi. Selain itu juga melalui pertemuan kelompok secara *face to face* dapat digunakan sebagai media

untuk saling bertukar pikiran, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini merupakan cara efektif untuk memberikan kesadaran, masukan, himbauan, dan saran bagi anggota yang belum bergabung dalam Program KB.

Meskipun, sosialisasi dan pembinaan Program KB yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan tersebut dinilai kurang efektif tetapi melalui pembinaan, pengarahan, dan penyuluhan mengenai Program KB; masyarakat kelompok sasaran (seluruh anggota PEKM) mendapatkan berbagai pengetahuan dan motivasi yang mendukung keikutsertaan (partisipasi) dalam Program KB (menjadi akseptor KB). Kegiatan pembinaan, pengarahan, dan penyuluhan mengenai Program KB yang telah diberikan, secara efektif dianggap telah mampu memberikan perubahan pada masyarakat kelompok sasaran khususnya yang belum menjadi akseptor KB. Melalui kegiatan pendampingan, baik yang dilakukan oleh BKK, PP dan KB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD bersama dengan Pamong Desa di antaranya melalui kegiatan pembinaan, pengarahan, dan penyuluhan mengenai Program KB dapat memotivasi dan mempengaruhi keterlibatan/ keikutsertaan masyarakat dalam Program KB secara efektif.

## **B. Evaluasi Mengenai *Impact* dari Kinerja Program PEKM di Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pajangan**

Supaya lebih mudah untuk memahaminya, dapat dijabarkan langkah-langkah analisis mengenai *impact* dari kinerja Program PEKM yang berada di Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pajangan, sebagai berikut:

### **1. Dampak Kinerja Program PEKM Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.**

Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kinerja Program PEKM ditinjau secara sosial-ekonomi dapat membantu permodalan bagi keluarga-keluarga miskin dan sebagian keluarga sejahtera, di dalam

mengembangkan usaha-usaha yang telah dijalankan maupun usaha-usaha yang baru dirintisnya melalui usaha skala mikro. Mereka apalagi juga telah dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh instansi/ dinas terkait yang berkompeten di bidangnya berkerjasama dengan pengemban tugas pelaksana harian BKK, PP dan KB. Berbagai materi dari pelatihan-pelatihan dan pengembangan keterampilan yang mampu dilakukan, seperti halnya; manajemen kewirausahaan, manajemen keorganisasian, keterampilan *prosessing/* momasak, keterampilan menjahit, keterampilan perbengkelan, keterampilan pembuatan jamu, penyuluhan peternakan dan pertanian, pelatihan SP-IRT (Sertifikasi Penyuluhan Industri Rumah Tangga), dan lain sebagainya.

Melalui usaha ekonomi produktif yang telah dijalankan seperti yang telah dipaparkan di atas, dalam realitasnya yang terjadi di lapangan melalui usaha ekonomi produktif tersebut dapat menambah pendapatan keluarga (meningkatkan pendapatan keluarga) meskipun jumlahnya sedikit. Peningkatan pendapatan yang tidak begitu signifikan tersebut sudah sangat membantu masyarakat miskin (kelompok sasaran program) untuk tambahan dalam membiayai kebutuhan anak. Misalnya saja peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh penjual angkringan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah satu penerima pinjaman bantuan PEKM yang mempunyai profesi sebagai penjual angkringan diketahui adanya peningkatan pendapatan meskipun jumlahnya tidak signifikan. Dengan mendapatkan bantuan PEKM, penjual angkringan tersebut menggunakan pinjaman modal PEKM sebagai tambahan modal untuk menambah jumlah dan jenis makanan yang diperdagangkan. Semakin banyak dan semakin beranekaragam macam dan jenis makanan yang dijual ternyata semakin menarik para pembeli sehingga jumlah pembeli dan jumlah pembelian semakin meningkat. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh menjadi bertambah meskipun jumlahnya sedikit.

## **2. Dampak Kinerja Program PEKM Bersama Program KB Terhadap Peningkatan Partisipasi (keikutsertaan) Masyarakat Sebagai Upaya**

## **Menurunkan Jumlah Kelahiran dan Pengaturan Jarak Kelahiran.**

Melalui pengevaluasian dari kinerja Program PEKM yang dijalankan bersamaan dengan Program KB untuk dilihat dampak-dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap penurunan jumlah kelahiran, dan pengaturan jarak kelahiran tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat ataupun dianalisis secara lebih kritis mengenai relevansinya dan keterkaitannya kedua program-program tersebut untuk mengetahui sejauhmana dan seberapa besar pengaruh-pengaruh (efek-efek) yang dapat terjadi atau dapat ditimbulkan terhadap anggota kelompok sasaran pada realitasnya di lapangan.

Setelah mereka mendapatkan pinjaman modal dan menjadi anggota kelompok PEKM selanjutnya juga menjadi anggota akseptor KB. Mereka merasakan kemanfaatan Program KB dan mengikuti akseptor KB, dengan asumsi bahwa mereka akan mampu mengurangi jumlah kelahiran anak sebagai keturunannya dari sebuah kehidupan berkeluarga. Bahkan mereka sangat optimistik sekali dengan usaha-usaha yang dijalankan ataupun mulai diintisnya, telah mampu untuk menambah ekonomi bagi kebutuhan keluarga mereka, seperti halnya; untuk menambah pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan, dan untuk membayar berbagai iuran-iuran yang harus ditanggungnya dalam berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat (di lingkungan mereka tinggal).

Terhadap hal-hal tersebut, maka dengan melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dapat ditarik suatu pemahaman yang menyeluruh (komprehensif) dan penganalisisan secara lebih mendalam lagi mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan, oleh para anggota kelompok sasaran berasal dari kedua program-program itu yang dijalankan secara bersamaan, meliputi antara lain:

### **a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Program KB.**

Adapun, *impact* (dampak) yang ditimbulkan dari implementasi Program PEKM yaitu *impact* yang sifatnya kecil-kecilan (*impact* jangka pendek) dan dalam kurun waktu lebih lama lagi, akan memunculkan

*impact* jangka panjang seperti halnya; penurunan jumlah kelahiran dan pengaturan jarak kelahiran. Berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan, *impact* yang ditimbulkan dari implementasi Program PEKM bersamaan dengan implementasi Program KB yaitu adanya peningkatan partisipasi (keikutsertaan) masyarakat terhadap Program KB. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program KB. Munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program KB ini dimotivasi dengan berbagai pembinaan dan sosialisasi mengenai Program KB yang telah dilakukan selama proses pendampingan; dan juga melalui pertemuan rutin kelompok secara *face to face* yang membuka kesempatan untuk saling bertukar pikiran dan saling memotivasi (mempengaruhi secara positif).

Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program KB ini terlihat dengan adanya peningkatan jumlah akseptor KB yaitu bergabungnya masyarakat yang non akseptor menjadi akseptor KB. Karena bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai Program KB yang kemudian akan memunculkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program KB. Peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap Program KB tersebut diperoleh melalui pengarahan dari PLKB dan pembinaan-pembinaan menyangkut Program KB yang merupakan bentuk fasilitasi dari Program PEKM. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program KB juga terlihat dengan adanya peningkatan akseptor KB aktif yang disebabkan oleh adanya peningkatan partisipasi masyarakat dari akseptor KB pasif menjadi akseptor KB aktif. Realitas semacam ini telah dijumpai di lapangan melalui wawancara yang telah dilakukan.

#### **b. Penurunan Jumlah Kelahiran.**

Bahwa akibat-akibat maupun dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari pengimplementasian Program KB bersamaan di dalamnya dilaksanakan Program PEKM oleh Tim PLKB melalui kebijakan Pemda Bantul (BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul), yaitu; memberikan bantuan pinjaman usaha ekonomi produktif kepada

anggota kelompok sasaran dari para keluarga-keluarga miskin atau sebagian keluarga-keluarga sejahtera maupun para kader-kader akseptor KB. Maka hal ini dapat meningkatkan kinerja Program KB bisa semakin efektif di lapangan dan bisa lebih efisien, dikarenakan para kelompok sasaran yang terdiri dari; para keluarga miskin, para keluarga sejahtera, para PUS, maupun para kader akseptor KB, akan lebih bisa termotivasi dan lebih bisa tergerak lagi menjadi anggota akseptor KB, dan lebih bisa memberikan semangat untuk mengajak, menghimbau, mendorong (memotivasi) bagi anggota kelompok PEKM yang belum mengikuti menjadi anggota akseptor KB supaya mereka dapat menjadi anggota akseptor KB. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang terjadi pada kenyataannya sangat efektif, untuk bisa mempengaruhi mereka yang non akseptor KB untuk dapat masuk menjadi akseptor KB melalui berbagai alat kontrasepsi yang mereka gunakan dan sebagainya.

Dengan begitu, dari kinerja program-program ini yang telah mampu dilaksanakan dalam realisasinya di lapangan yang diharapkan mampu memberikan *impact* jangka panjang, adalah: mampu mengurangi jumlah kelahiran bayi pada Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pajangan, walaupun kenyataan ini, belum bisa menunjukkan signifikansi yang besar sekali ataupun kevaliditasannya belum dapat betul-betul bisa teruji dalam kurun waktu jangka panjang. Namun demikian, terhadap fakta-fakta ini bisa sebagai cerminan mengenai kemanfaatan dari stimulus-stimulus yang harus diberikan, seperti halnya; bantuan pinjaman modal PEKM yang diberikan kepada kelompok-kelompok sasaran untuk merangsang secara pro-aktif keikutsertaan (partisipasi) mereka perihal Program KB maupun menjadi anggota akseptor KB.

Dilihat dari pencapaian dampak terhadap implementasi Program PEKM bersama-sama dengan Program KB yaitu penurunan jumlah kelahiran; tidak terlepas dari adanya berbagai kendala. Kendala-kendala yang muncul antara lain kesadaran masyarakat yang muncul belum kuat pada sebagian masyarakat sehingga masyarakat kadang-kadang masih bersikap labil (mudah dipengaruhi ke hal-hal negatif) sehingga jika tidak dilakukan pendampingan secara intensif melalui

pembinaan-pembinaan maka kesadaran yang terbentuk pada masyarakat tidak akan kuat.

### **c. Pengaturan Jarak Kelahiran.**

Mengenai Program KB yang telah mampu disosialisasikan dan dilakukan pembinaan-pembinaan oleh Tim PLKB di tiap-tiap Kecamatan yang ada kepada anggota kelompok sasaran, akan dapat menumbuhkan pemahaman dan bangkitnya kesadaran bagi mereka terhadap kemanfaatannya menjadi anggota akseptor KB. Melalui pemberian pengetahuan dan memotivasi kepada para anggota kelompok yang mendapatkan pinjaman modal dari Program PEKM, akan dapat menambah ketertarikan mereka dan menumbuhkan sikap yang simpatik mengenai Program KB, dan dapat mendorong mereka lebih bisa termotivasi dengan kesadaran mereka sendiri tanpa adanya unsur-unsur paksaan untuk menjadi anggota akseptor KB, serta memberikan pengaruh-pengaruh (efek-efek) kepada mereka atas pemahamannya mengenai manfaat ber-KB (mengikuti Program KB) sebagai anggota kelompok sasaran menjadi bisa mengatur jarak kelahiran terhadap anak-anaknya. Maka hal ini mempunyai orientasi ke depan akan memberikan dampak-dampak jangka panjang yang sangat besar terhadap pengaturan jarak kelahiran yang dapat dilakukan oleh para anggota kelompok sasaran.

Walaupun, kenyataan hal tersebut terhadap program-program ini belum bisa menunjukkan signifikansi yang besar sekali ataupun kevaliditasannya belum dapat teruji secara pasti dalam kurun waktu jangka panjang. Namun demikian, terhadap fakta-fakta ini bisa sebagai cerminan mengenai kemanfaatan dari stimulus-stimulus yang harus diberikan, seperti halnya; bantuan pinjaman modal PEKM yang diberikan kepada kelompok-kelompok sasaran untuk merangsang secara pro-aktif keikutsertaan (partisipasi) mereka perihal Program KB maupun menjadi anggota akseptor KB.

## **C. Analisis Efektivitas Program PEKM bersamaan dengan Program**

## KB di Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Pajangan

Bahwa tingkat efektivitas Program PEKM yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul ini mengenai realitasnya yang terjadi yaitu belum mampu menunjukkan efektivitas yang optimal dikarenakan belum dapat mencapai tujuan dan sasarnya sesuai dengan target yang diinginkan. Berdasarkan realitas yang terjadi, sebagian besar program-program pemerintah yang sejenis dengan Program PEKM yaitu program pemberian bantuan tunai ini memperlihatkan bahwa hanyalah bersifat *target oriented* saja. Pemerintah hanya sekedar menyalurkan atau mendistribusikan bantuan dana untuk sampai pada kelompok sasaran dan selebihnya tidak ada upaya tindak lanjut (keberlanjutan) untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Hal ini akan menanamkan dan membentuk sikap ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah, bukan menanamkan semangat kewirausahaan dan tidak membentuk sikap kemandirian terhadap masyarakat miskin. Dikarenakan pada beberapa program yang sifatnya *given* atau pemberian yang sifatnya cuma-cuma atau bersifat *charity* tidak dapat membawa perubahan pada pemberdayaan masyarakat tetapi justru akan memanjakan masyarakat dan bukan memberdayakan masyarakat. Namun melihat dari implementasi Program PEKM ini, pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini BKK, PP dan KB telah mencoba untuk tidak sekedar mendistribusikan bantuan dana sampai pada kelompok sasaran tetapi telah mencoba untuk melakukan upaya tindak lanjut melalui pendampingan yang telah dilakukan dengan menyediakan tim pendamping lapangan (PLKB) demi tercapainya upaya pemberdayaan masyarakat dan terciptanya kondisi masyarakat yang lebih baik. Meskipun upaya pendampingan yang telah dilakukan belum maksimal (masih setengah-setengah) disebabkan adanya kendala dan terbentur oleh terbatasnya jumlah anggaran untuk alokasi Program PEKM khususnya untuk operasional program di lapangan. Maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah tak jarang mengimplementasikan program sebagai proyek.

Fenomena ini sangat kelihatan pada era ini, pemerintah sebagai

pemegang kebijakan dan program beserta tentu saja dana yang dimilikinya selalu membuat berbagai proyek untuk pembangunan. Namun beberapa proyek pembangunan yang telah mampu diimplementasikan belum bisa menyentuh sampai kepada masyarakat lapisan paling bawah (baca: masyarakat miskin). Hal inipun seperti halnya program PEKM sebagai salah satu terobosan kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tersebut. Dalam hal ini jangan sampai terjadi juga seperti halnya proyek-proyek yang sudah dijalankan oleh Pemerintah selama ini tidak mampu mengatasi dan menanggulangi kemiskinan yang ada pada sebagian anak-anak negeri ini. Bahkan semakin tahun demi tahun pun mengalami pertumbuhan yang signifikan mengenai jumlah masyarakat miskin. Dengan demikian, hal ini sebagai kegagalan-kegagalan yang dialami oleh pemerintah itu sendiri terhadap kebijakan dan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada sebagian anak-anak negeri ini, yang telah direncanakan dan telah dipancangkan untuk diberantas atau ditekan pertumbuhannya tersebut.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Pengevaluasian mengenai *output* dari kinerja program tersebut yang telah dijalankan dalam prakteknya di lapangan, dapat dinilai dan disimpulkan untuk melihat efektivitas program. Mengenai jumlah penerima pinjaman modal dan nilai bantuan dana bergulir sudah dialokasikan berdasarkan ketentuan program dan telah didistribusikan tepat kepada kelompok sasaran yaitu keluarga miskin yang tergolong PUS dan sedang atau akan membuka usaha baru. Mengenai jumlah Tim PLKB dan beban kerja (tanggungjawab) petugas dalam melakukan pendampingan pelaksanaan Program PEKM maupun Program KB yaitu Tim PLKB telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan beban kerja yang dibenkan yaitu antara lain melakukan pendampingan, memberikan sosialisasi Program PEKM, memberikan pelatihan dan pembinaan Program KB, menjadi mediator dan fasilitator antara masyarakat penerima bantuan dengan pemerintah (BKK PP dan KB), serta melakukan pendataan dan pelaporan

mengenai implementasi Program PEKM (menyangkut *move*). Mengenai tingkat frekuensi sosialisasi dan pengarahan mengenai pelaksanaan Program PEKM kepada kelompok sasaran telah diimplementasikan dengan baik. Kemudian mengenai tingkat frekuensi pelatihan dan pembinaan kepada kelompok sasaran PEKM yang telah mampu dijalankan oleh Tim PLKB bersama BKK, PP dan KB berkolaborasi dengan instansi/ dinas terkait yang berkompeten di bidangnya. Hanya saja dalam pelaksanaan pelatihan, tidak selalu mengikutsertakan seluruh anggota PEKM mengingat keterbatasan anggaran. Pelaksanaan pelatihan hanya melalui sistem perwakilan.

Hal ini pada realisasinya, *output* yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan yang harus dicapai dan sudah dijalankan dengan baik. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang menyangkut *output* program, yaitu; melihat intensitasnya dan jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan dan pembinaan perlu diperbanyak/ ditambah atau diupayakan dapat dilakukan dengan *face to face* kepada semua kelompok PEKM. Karena pelatihan yang diadakan hanya melalui sistem perwakilan, sehingga tidak dapat diikuti oleh semua anggota PEKM. Tetapi anggota yang ditunjuk sebagai wakil akan menyampaikan kepada anggota lainnya pada saat pertemuan rutinitas kelompok. Mengenai jumlah SDM Tim PLKB yang ada di lapangan masih diperlukan penambahan jumlah SDM yang berkompeten di bidang penyuluhan KB dan pendampingan masyarakat, berkompeten di bidang pelatihan manajemen usaha dan *skill*, serta berkompeten di bidang pendataan dan pelaporan. Melihat realitas di lapangan bahwa dengan sekian banyak masyarakat penerima bantuan PEKM dalam satu kecamatan kurang efektif jika dalam pendampingan hanya dilakukan oleh 2 orang PLKB dengan beban kerja yang besar. Diperlukan penambahan jumlah SDM Tim PLKB di setiap kecamatan yaitu kurang lebih 3 orang; sehingga di setiap kecamatan terdapat 5 orang Tim PLKB. 2 orang PLKB yang berkompeten di bidang pendampingan masyarakat (melakukan penyuluhan dan pembinaan Program KB); 2 orang PLKB yang berkompeten di bidang pelatihan *skill* (keterampilan) dan manajemen usaha; dan 1 orang PLKB yang berkompeten di bidang pendataan dan pelaporan mengenai Program

PEKM dan Program KB. Karena berdasarkan realitas di lapangan, menyangkut pendataan dan pelaporan mengenai Program PEKM dan Program KB belum memadai dan belum tertib administrasi. Kendala yang lainnya yaitu belum terlihat kerjasama (kemitraan) secara komprehensif yang didukung dengan sistem koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya, tokoh masyarakat, dan LSM. Karena jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok sasaran masih membutuhkan pelatihan dari instansi yang terkait dengan jenis usahanya; misalkan usaha ternak sapi dibutuhkan penyuluhan dari Dinas Peternakan, usaha toko kelontong dibutuhkan penyuluhan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

Pengevaluasian mengenai *outcome* dari kinerja program tersebut yang telah dijalankan dalam prakteknya di lapangan seperti halnya: Melakukan berbagai analisis dan *monitoring* serta evaluasi terhadap pengalokasian dan ketepatan penggunaan dana oleh anggota kelompok PEKM; peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang didapat oleh anggota kelompok PEKM; peningkatan modal, peningkatan kualitas produk, dan kemampuan perkembangan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok PEKM; dan selanjutnya mengenai peningkatan pengetahuan, motivasi, dan kesadaran bagi anggota kelompok PEKM terhadap Program KB dan peningkatan jumlah akseptor KB. Mengenai penggunaan dana, sebagian besar masyarakat kelompok sasaran telah menggunakan dana pinjaman sebagaimana mestinya yaitu untuk membuka usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Melalui pelatihan keterampilan (*skill*) dan manajemen usaha dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (*skill*) masyarakat, sehingga dapat menciptakan dan menambah peluang usaha baru bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan fasilitas (pemberian bantuan untuk pendukung usaha) dan kemudahan-kemudahan (bantuan pinjaman modal) dari dinas dan instansi terkait untuk mendukung pengembangan usahanya. Dengan demikian, masyarakat kelompok sasaran telah terbantu dalam hal permodalan untuk membuka usaha baru maupun untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Melalui sosialisasi dan pembinaan Program KB dapat memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Program

KB, yang selanjutnya dapat mengubah pola pikir, perilaku dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan dalam Program KB. Maka dari fakta-fakta yang telah ditemukan di lapangan menunjukkan kinerja program mampu berjalan dengan efektif, dan kinerjanya bisa lebih ditingkatkan lagi dan untuk bisa berkesinambungan (berkelanjutan) di dalam pengimplementasiannya.

Hal ini pada realisasinya, *outcome* yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan yang harus dicapai dan sesuai dengan hasil yang dicapai. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang menyangkut *outcome* program, yaitu; kurang intensifnya tindakan dan respons pemerintah dikarenakan kurangnya kerjasama antar instansi dan belum terwujudnya kemitraan dengan pemerintah, pihak swasta dan LSM. Melihat realitas di lapangan, masyarakat masih membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam hal pemasaran produk (hasil usaha). Untuk membantu pemasaran, diperlukan bantuan dari pemerintah untuk membantu dalam melakukan promosi (untuk jenis usaha kerajinan tangan). Tetapi sejauh ini pemerintah (BKK PP dan KB) telah membantu pemasaran melalui pelatihan pembuatan SP-IRT (Ijin usaha) supaya barang dagangan dapat dipasarkan ke supermarket dan swalayan (memperluas pemasaran). Kendala lainnya yang dihadapi yaitu dengan keterbatasan SDM Tim PLKB maka kurang dapat melakukan evaluasi dan monitoring di lapangan sehingga dalam realitasnya masih dijumpai adanya kegagalan-kegagalan yang dihadapi para anggota PEKM dalam mengembangkan usahanya dan terdapat beberapa anggota PEKM yang tidak mempunyai usaha tetapi tidak diketahui oleh Tim PLKB.

Pengevaluasian mengenai *impact* dari kinerja program tersebut yang telah dijalankan dalam prakteknya di lapangan, yaitu; terhadap realisasinya di lapangan, dapat dilakukan analisis maupun dilakukan penilaian-penilaian mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan pada kelompok sasaran terhadap peningkatan pendapatan keluarga melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, dan penurunan jumlah kelahiran, serta pengaturan jarak kelahiran bagi anggota kelompok PEKM tersebut. Dengan adanya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat

serta tumbuhnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap Program KB ini telah dapat mempengaruhi partisipasi (keikutsertaan) masyarakat dalam Program KB. Berdasarkan realitas di lapangan terjadi peningkatan jumlah akseptor KB terhadap penerima bantuan PEKM (yang tergolong PUS), meskipun peningkatannya tidak begitu signifikan dikarenakan sebagian besar PUS penerima bantuan PEKM sudah menjadi akseptor KB. Tetapi melalui implementasi Program PEKM ini dapat memotivasi dan menumbuhkan kesadaran bagi penerima bantuan PEKM (yang tergolong PUS) yang belum akseptor untuk bergabung menjadi akseptor KB aktif. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan jumlah akseptor KB baru bagi masyarakat penerima bantuan PEKM yang masih tergolong PUS. Hal ini pada realitasnya di lapangan, mampu berjalan secara efektif untuk menarik para anggota kelompok yang belum menjadi anggota akseptor KB terdorong dengan kesadaran dan pemahaman mereka sendiri, tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Mereka terpanggil untuk berpartisipasi melalui kesukarelaannya menjadi anggota akseptor KB dikarenakan telah berubahnya *mindset* mereka mengenai manfaat dari Program KB.

Hal ini pada realisasinya, *impact* yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan yang harus dicapai dan sesuai dengan hasil yang dicapai. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang menyangkut *impact* program, yaitu; belum mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara optimal terhadap keberhasilannya dalam artian bahwa peningkatan pendapatannya masih relatif kecil, tetapi sudah dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan meskipun belum dapat mengubah kondisi kemiskinan yang dialami. Melalui implementasi Program KB ini belum mampu mengajak (secara keseluruhan) semua anggota PEKM yang belum menjadi akseptor KB untuk bergabung menjadi akseptor KB aktif. Tetapi sudah mampu memotivasi dan mengajak sebagian masyarakat yang belum akseptor untuk menjadi akseptor (meskipun belum semuanya).

## 2. Rekomendasi Kebijakan

Adapun, faedah-faedah yang dapat diharapkan sebagai rekomendasi kebijakan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Memproses pendampingan di lapangan merupakan proses yang sangat vital. Hal ini supaya proses pendampingan dapat mencapai hasil yang efektif, maka harus ada penambahan jumlah SDM Tim PLKB di setiap kecamatan yaitu kurang lebih 3 orang; sehingga di setiap kecamatan terdapat 5 orang Tim PLKB. 2 orang PLKB yang berkompeten di bidang pendampingan masyarakat (melakukan penyuluhan dan pembinaan Program KB); 2 orang PLKB yang berkompeten di bidang pelatihan *skill* (keterampilan) dan manajemen usaha; dan 1 orang PLKB yang berkompeten di bidang pendataan dan pelaporan mengenai Program PEKM dan Program KB.
- b. Sebaiknya perolehan *reward* tersebut harus disupport dengan persyaratan khusus yang tidak hanya melalui persyaratan pengembalian pinjaman modal yang tepat waktu, melainkan juga melalui persyaratan uji kelayakan usaha yang telah dibuka dan dikembangkan oleh para anggota PEKM.
- c. Pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul) seharusnya melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) guna mengevaluasi program yang sudah dijalankan, untuk melihat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dan untuk merespons kebutuhan masyarakat dalam pengembangan usahanya sehingga kegagalan-kegagalan dapat diantisipasi.
- d. Diperlukan tindakan pemerintah yang lebih intensif dalam membantu pemasaran produk-produk melalui promosi dan pembuatan SP-IRT (ijin usaha).
- e. Diperlukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemberian pelatihan *skill* dan manajemen usaha serta diperlukan adanya (kemitraan) antara pemerintah, pihak swasta dan LSM.
- f. Diperlukan perbaikan-perbaikan mengenai mekanisme dalam pengimplementasian terhadap teknis operasionalisasinya, peningkatan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan pengemasan produk kepada kelompok sasaran, peningkatan *pe-monitoring-an* dan pengevaluasian terhadap para petugas di lapangan, serta peningkatan tertib administrasi dan pelaporan program tersebut untuk pertanggungjawaban kepada publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Sunartiningsih, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*, Aditya Media, Yogyakarta, 2004.
- Bagong, Suyanto, *Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, Aditya Media, Yogyakarta, 1996.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Muhadjir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1990.
- Prnhatin, Djuni S. dan Suyatna, Hempti, *Pembangunan dan Kemiskinan*, Aditya Media, Yogyakarta, 2006.
- Sullstiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Wibawa Samodra, *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.